

DATA PROSES PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016

Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Mataram

NAMA DAERAH	PERKEMBANGAN PROPEMPERDA 2016					KET.
	RAPERDA DALAM PROPEMPERDA 2016	RAPERDA PROLEGDA 2015 YANG DILANJUTKAN PEMBAHASANNYA DI TAHUN 2016	RAPERDA YANG SUDAH DALAM PEMBAHASAN DPRD	RAPERDA DILUAR PROPEMPERDA 2016 YANG DIAJUKAN SEBAGAI TAMBAHAN DALAM PROLEGDA 2016	RAPERDA PROPEMPERDA 2016 YANG SUDAH MENJADI PERDA	
1	2	3	4	5	6	7
Kota Mataram	<p>A. Raperda Inisiatif DPRD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Publik. (Perda No 3 Tahun 2016) 2. Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. 3. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (Perda No 4 Tahun 2016) 4. Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Penyandang Disabilitas. (Perda No 6 Tahun 2016) 5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. 6. Penyelenggaraan Perhubungan. (Perda No 7 Tahun 2016) 7. Hari Lahir, Lagu Hymne, dan Mars Kota Mataram. 8. Sistem Inovasi Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. (Perda No 1 Tahun 2016) 2. Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Mataram. (Perda No 2 Tahun 2016) 3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (perda No 11 Tahun 2016) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Publik. (Perda No 3 Tahun 2016) 2. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (Perda No 4 Tahun 2016) 3. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. (Perda No 5 Tahun 2016) 4. Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Penyandang Disabilitas. (Perda No 6 Tahun 2016) 5. Penyelenggaraan Perhubungan. (Perda No 7 Tahun 2016) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (masih proses fasilitasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. 2. Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Mataram. 3. Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 4. Perda No 4 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas. 5. Perda No 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>9. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. (Perda No 5 Tahun 2016)</p> <p>10. Ternak Peliharaan.</p> <p>11. Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai.</p> <p>12. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Mataram.</p> <p>13. Penyelenggaraan Usaha Waralaba.</p> <p>14. Upaya Kesehatan Masyarakat.</p> <p>15. Pemakaman.</p> <p>16. Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>17. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.</p> <p>18. Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Keluarga.</p> <p>19. Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Lanjut Usia.</p> <p>20. Sistem Pelayanan Pajak Daerah.</p> <p>21. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat. (Perda No 8 Tahun 2016)</p>	<p>4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. (perda No 13 Tahun 2016)</p> <p>5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (perda No 12 Tahun 2016)</p>	<p>6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat. (Perda No 8 Tahun 2016)</p> <p>7. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Mataram (masih perlu pengkajian)</p> <p>8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (Masih proses evaluasi)</p> <p>9. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. (masih proses fasilitasi)</p>		<p>6. Perda No 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>7. Perda No 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.</p> <p>8. Perda No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat.</p> <p>9. Perda No 9 Tahun 2016 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015</p> <p>10. Perda No 10 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>B. Raperda Inisiatif Kepala Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. (masih dalam fasilitas) 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (masih dalam fasilitas) 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (masih dalam fasilitas) 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5. Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Mataram. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020. (Perda No 10 Tahun 2016) 		<ol style="list-style-type: none"> 10. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya. (masih proses fasilitas) 11. Raperda tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (masih dalam fasilitas) 12. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. (Perda No 9 Tahun 2016) 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021. (Perda No 10 Tahun 2016) 14. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Perda No 14 Tahun 2016) 		<ol style="list-style-type: none"> 11. perda No 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 12. perda No 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. 13. perda No 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. 14. Perda No 14 Tahun 2016 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 15. Perda No 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. 	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>7. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram (tunggu Peraturan Pemerintah.</p> <p>8. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. (Perda No 15 Tahun 2016)</p> <p>9. Penyertaan Modal.</p> <p>10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. (Perda No 9 Tahun 2016)</p> <p>11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Perda No 14 Tahun 2016)</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.</p> <p>13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram.</p> <p>14. Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.</p>		<p>15. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram.</p> <p>16. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. (Perda No 15 Tahun 2016)</p>			

1	2	3	4	5	6	7
	15.Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.					

Mataram, 27 Oktober 2016
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM,

MANSUR, SH. MH
Pembina (IV/a)
NIP. 197012312002121035